

## A. BUKU

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid. tanpa tahun. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitesier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rukmono, Bambang Sugeng. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Salim, H.S. dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Stephen, J. F., 1976. “*Capital Punishment*” dalam L. Blom-Cooper and G. Drewry (Eds.), *Law and Morality*. London: Gerald Duckworth.

Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

Anjari, Warih. *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E-Journal Widya Yustisia Volume I Nomor 2. Maret 2015.

Haling, Syamsul. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48 Nomor 2. Tahun 2018.

Rahantoknam, Brian. *Pidana Mati Bagi Koruptor*. Jurnal Lex Crimen Vol. II Nomor 7. November 2013.

Rusli, Hardijan. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Nomor 3 Tahun 2006.

Santoso, Budi. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional Volume X. Agustus 2005.

Yifa Zhiguo (Rule of Law), yanzheng fubai [Govern the Country according to Law, seferely punish corruption] 9<sup>th</sup> of March, 2000.

## **C. INTERNET**

“*Mencontek adalah Korupsi*”,  
<<https://www.kompasiana.com/febronipurba/552be1aa6ea834c24f8b4585/mencontek-adalah-korupsi>> diakses tanggal 1 Juli 2020 Pukul 09.00.

“*ICW : 1.162 Terdakwa Kasus Korupsi di Tahun 2018, 918 Terdakwa Divonis Hukuman Ringan*”, <<https://solo.tribunnews.com/2019/04/28/icw-ada-1162-terdakwa-kasus-korupsi-di-tahun-2018-918-terdakwa-divonis-hukuman-ringan>>, diakses tanggal 2 Desember 2019 Pukul 17.00 .

- “Hukuman Mati Koruptor di 4 Negara, Indonesia Kapan?”  
<<https://www.tagar.id/hukuman-mati-koruptor-di-4-negara-indonesia-kapan>>, diakses tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 11.00
- “Artidjo: Tidak ada Istilah “Memiskinkan” Koruptor, Tapi...”  
<<https://news.detik.com/berita/d-2423063/artidjo-tak-ada-istilah-memiskinkan-koruptor-tapi>>, diakses tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 13.00.
- “Rekam Jejak Tamzil, Bupati Kudus yang ditangkap KPK”  
<https://kumparan.com/kumparannews/rekam-jejak-tamzil-bupati-kudus-yang-ditangkap-kpk-1rXlBkrbQkO>, diakses tanggal 1 Desember 2020 Pkl. 09.00
- “Rekor Baru, 20 Tahun Bui dan Bonus Tembak”  
<<https://nasional.kompas.com/read/2008/07/15/09504960/about.html>>, diakses tanggal 2 Januari 2021 Pkl. 13.00
- “Teori Penegakan Hukum” <<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>> diakses Senin, 7 Oktober 2019 Pukul 14.00.
- “Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia” < <https://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>>, diakses tanggal 22 Januari 2021 Pkl. 16.00.
- “Keadaan Darurat Korupsi” <<https://historia.id/politik/articles/keadaan-darurat-korupsi-DBxkP/page/1>>, diakses tanggal 22 Januari 2021 Pkl. 16.00.
- “Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia”  
<[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3)>, diakses 23 Januari 2021 Pkl. 10.00.
- “Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK Sebut Indonesia Masih Dinilai Negara Korup” <<https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-persepsi-korupsi-turun-kpk-sebut-indonesia-masih-dinilai-negara-korup.html>>, diakses tanggal 13 Februari 2021 Pukul 23.00.

#### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

\_\_\_\_\_. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

\_\_\_\_\_. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi